

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang, bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk yang akan dialokasikan guna membiayai pengeluaran rutin pemerintah pusat, contoh dari pajak pusat antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Materai. Sementara Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah terbagi kembali menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda terkait pajak daerah dan setiap daerah juga diberi kewenangan agar dapat mengelola sendiri pajak daerah apa saja yang dapat dipungut berdasarkan potensi di wilayah tersebut. Karena sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah supaya dapat mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

(PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah juga terbagi kembali menjadi dua jenis yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk pajak Kabupaten/Kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, PBB Perdesaan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kabupaten Batang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terus berkembang dengan melakukan berbagai pembangunan agar kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai. Munculnya pariwisata baru membuat wisatawan baik dari dalam maupun dari luar tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Batang ini. Disamping munculnya pariwisata baru tersebut, para pelaku usaha juga tidak ingin menyalahgunakan kesempatan untuk membuka berbagai macam kuliner di Kabupaten Batang. Banyak dari pelaku usaha tersebut membuka kuliner mereka di tempat-tempat wisata agar wisatawan dapat menikmati tempat wisata sekaligus mencicipi kuliner di Kabupaten Batang. Dengan adanya rumah makan baru, dijadikan peluang agar jumlah wajib pajak restoran bertambah. Adanya peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Batang agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat melalui penerimaan pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019, pajak restoran merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas

pembayaran pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019 sebesar 10% dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran.

Pada Tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan jumlah wajib Pajak Restoran di Kabupaten Batang dari tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 1.1
Perkembangan Wajib Pajak Restoran Tahun 2017 hingga 2019 di Kabupaten Batang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2017	120
2018	115
2019	117

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

Dari data tabel 1.1 dan penghitungan persentase diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar yaitu 120, namun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan menjadi 115, maka persentase penurunan tahun 2017 ke 2018 yaitu 4,1%. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 117, maka persentase kenaikan tahun 2018 ke 2019 yaitu 1,7% . Fluktuasi yang dialami ini, disebabkan karena ada beberapa hal kemungkinan yang terjadi, yaitu beberapa restoran atau rumah makan yang tidak lagi menjadi wajib pajak restoran dikarenakan omzetnya tidak mencapai Rp 5.000.000,- per bulannya

dan adanya penutupan tempat usaha tersebut. Namun, dengan meningkatnya kembali jumlah wajib pajak restoran di tahun 2019, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Batang dapat menggali dan memanfaatkan potensi tersebut agar penerimaan pajak restoran dapat meningkat.

Pada Tabel 1.2 dibawah ini menunjukkan Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Batang dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2017 sampai dengan 2019 di Kabupaten Batang

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2017	2.295.000.000	2.618.814.696	114,11%
2018	3.106.726.500	3.585.116.007	115,40%
2019	3.045.000.000	3.435.456.896	112,82%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat target dan realisasi pajak restoran selama 3 tahun terakhir. Pajak Restoran merupakan salah satu potensi yang penerimaannya cukup besar di Kabupaten Batang. Menurut tabel 1.2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan target tiap tahunnya terus meningkat, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan target. Begitu juga pada realisasi mengalami peningkatan di tahun 2018, hanya saja pada tahun 2019 realisasi mengalami penurunan. Dari seluruh persentase tersebut mengenai tingkat efektivitasnya dapat dikatakan sangat efektif untuk tahun 2017 hingga tahun 2019, hal ini dikarenakan persentase realisasi terhadap target selalu diatas 100% dan dapat dikatakan berhasil dalam mengelola penerimaan pajak restoran di Kabupaten Batang.

Terkadang dalam pelaporan pajak restoran terdapat tindakan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak Restoran. Wajib Pajak Restoran dalam melaporkan penghasilannya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya, sehingga penerimaan pajak restoran tidak maksimal. Dengan adanya tindakan kecurangan tersebut, pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemasangan alat Tapping Box mulai tahun 2019 untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam melaporkan penghasilan. Pemasangan tapping box ini, dimaksudkan agar dapat memantau setiap transaksi usaha secara online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung penghasilan di restoran atau rumah makan tersebut dan secara otomatis dapat merekam setiap ada transaksi. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam melaporkan penghasilan, sehingga penerimaan pajak restoran menjadi maksimal. Jadi, jika terdapat Wajib Pajak Restoran yang tidak jujur dalam melaporkan penghasilannya dapat diketahui. Namun, beberapa Wajib Pajak Restoran masih saja kurang memiliki kesadaran untuk menggunakan tapping box tersebut dengan tidak sepenuhnya memakai tapping box setiap hari.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai Pajak Restoran di Kabupaten Batang dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Efektivitas Realisasi dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang tahun 2017 sampai dengan 2019?
2. Apa saja kendala saat menggunakan Tapping Box pada restoran?
3. Bagaimana upaya dan solusi yang tepat dan harus dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang untuk mengatasi permasalahan terkait Pajak Restoran yang ada?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang tahun 2017 sampai dengan 2019.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala saat menggunakan Tapping Box pada restoran.
3. Untuk mengetahui upaya dan solusi yang tepat dan harus dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang untuk mengatasi permasalahan terkait Pajak Restoran yang ada.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap bahwa Tugas Akhir yang disajikan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang

Menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Batang khususnya kantor BPKPAD Kabupaten Batang supaya lebih baik dalam mengelola pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran pada tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Pajak Restoran serta mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan Praktek Kerja Lapangan terutama pada bidang perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pembelajaran dan menambah pengetahuan pajak daerah khususnya Pajak Restoran. Dan diharapkan pembaca dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai Pajak Restoran agar masyarakat semakin sadar pentingnya taat membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan mencari tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian guna dijadikan dasar dan pedoman dalam mendukung pokok permasalahan penelitian yang akan diuraikan.

BAB III GAMBARAN UMUM dan METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) dimana menjelaskan visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Batang serta metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun Tugas Akhir ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian.